

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kondisi alamiah wilayah Kashmir yang sangat menarik, menjadi pemicu bagi siapapun untuk mengunjungi dan mampu menguasai. Terletak di kaki Gunung Himalaya dengan sumber daya alam yang melimpah dan pemandangan yang indah. Besar potensi untuk dimanfaatkan dan mampu meningkatkan ekonomi India, namun besar juga potensi untuk menyebabkan konflik perebutan wilayah antar negara perbatasan.

Ketika Inggris membagi kedua wilayah jajahannya sebagai India dan Pakistan dengan pembagian yang tidak adil sehingga menimbulkan konflik hingga saat ini. Kashmir merupakan salah satu konflik internasional yang masih belum selesai sejak tahun 1947. Kashmir terletak di perbatasan wilayah India dan Pakistan, sehingga kedua negara memiliki wilayah Kashmir yang terbagi menjadi 2 teritori. Penduduk Kashmir mayoritas beragama Islam, namun Kashmir bagian India dipimpin oleh Maharaja Harry Sigh yang beragama Hindu dan menjualnya kepada pemerintah India.

India yang diwakili oleh Perdana Menteri Indira Gandhi dan Pakistan diwakili oleh Presiden Zulfikar pada tahun 1972 membentuk perjanjian “*Simla Agreement*” yang berisi perjanjian kesepakatan *Line of Control* sebagai batas wilayah kedua negara dalam menguasai wilayah Kashmir.

Pakistan merasa tidak terima dengan sebagian wilayah Kashmir yang dikuasai oleh India dan masyarakat Kashmir juga merasa keberatan apabila bergabung dengan India, karena secara spiritual dan budaya lebih dekat dengan Pakistan. Konflik yang berkepanjangan menjadi salah satu isu internasional dan masuk dalam agenda pembahasan UN, sehingga menjadi salah satu resolusi yang diratifikasi oleh Perdana Menteri Jawaharlal Nehru. Pada tahun 1949 Jammu, Kashmir, dan Ladakh sebagai wilayah dari negara bagian India yang memiliki otonomi sendiri dan diatur dalam Pasal 370 dan *article* 35A. Pasal 370 menjelaskan bahwa Kashmir berhak menentukan bendera dan konstitusinya sendiri kecuali urusan militer dan luar negeri. Sedangkan *article* 35A memperjelas hak bagi orang diluar Kashmir dilarang menetap secara permanen, menduduki jabatan pemerintahan, mendapatkan beasiswa, dan untuk perempuan yang menikah dengan lelaki dari luar Kashmir maka akan dicabut hak kepemilikannya sampai anak turunya.

Konflik Kashmir dalam karya tulis ini dianalisis menggunakan teori diplomasi koersif. Tahun penelitian yang dimulai dari 2012 yang dilatarbelakangi oleh India pertama kali uji coba nuklir terbesarnya yaitu Agni V. Konflik yang kompleks membuat hubungan kedua negara fluktuatif, sehingga selain upaya *hard power* dan *soft power* telah dilakukan kedua negara.

Diplomasi koersif India terbagi kedalam aspek *proportionality*, aspek *reciprocity*, dan aspek *coercive credibility*. Nuklir India tersedia lengkap dengan 9 series. Militer India merupakan terkuat nomor 2 di Asia dan nomor 4 di dunia, serta lengkap dengan segala jenis senjatanya. Geopolitik India yang dinamis baik secara domestik maupun internasional mendorong menjadi faktor utama konflik menjadi

fluktuatif. Terkadang hubungan baik bisa terjalin dengan kerja sama atau pertandingan olah raga, namun ketika ketegangan hubungan kedua negara terjadi maka nuklir dan militer menjadi senjata utama India yang mampu mengancam Pakistan.

Pada tahun 2019 konflik Kashmir semakin kompleks, pemerintah India mencabut hak istimewa wilayah Kashmir. Otonomi Jammu dan Kashmir yang sebelumnya terdiri dari 3 wilayah Jammu, Kashmir dan Ladakh, kini terbagi menjadi 2 wilayah teritori negara bagian India, Jammu dan Kashmir, serta Ladakh secara terpisah. Bersamaan dengan dicabutnya hak istimewa Kashmir, pemerintah India juga menghapus pasal 370 dan *article* 35A. Hal ini banyak mendapat kecaman dari dunia internasional, karena sangat merugikan masyarakat Kashmir dan membawa kabar buruk untuk masa depan Kashmir. Hubungan India dan Pakistan juga kembali memuncak atas panjang yang berjalan seiring dengan sejarah terbentuknya kedua negara.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Dalam diplomasi koersif tentu terdapat 2 aktor yaitu *coercer state* dan *target state*. Tentu kedua actor memiliki kepentingan dan sumber daya yang berbeda, sehingga sebaiknya kedua aktor dapat mempertimbangkan

segala kondisi dan resiko sebelum mengambil kebijakan atau *sticks and carrots*..

2. Diharapkan kedua negara mampu untuk mengakhiri konflik, karena banyak korban yang meninggal serta pelanggaran hak asasi manusia sejak konflik ini berjalan hingga saat ini.
3. Berbagai pilihan yang bisa digunakan sebagai solusi untuk mengakhiri konflik seperti dengan memberikan otonomi khusus untuk wilayah Kashmir, atau memberikan kebebasan bagi masyarakat Kashmir untuk menentukan pilihan sendiri atas nasibnya, atau Kashmir India tergabung dengan India namun mendapatkan hak dan kewajiban selayaknya masyarakat India yang lain.

